

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Menurut Ali *et al* (2007) dalam Fatmawati (2013), *agency problem* atau masalah keagenan ada dua macam yaitu masalah keagenan Tipe I dan Tipe II. Masalah keagenan Tipe I adalah masalah keagenan yang tidak terlalu parah yang muncul karena pemisahan antara pemegang saham dan manajemen. Masalah keagenan Tipe II adalah masalah keagenan yang lebih parah yang muncul di antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Sampai saat ini telah diketahui ada lima macam hubungan keagenan, yaitu:

1. Manajer vs pemegang saham yaitu pemegang saham menginginkan kenaikan keuntungan, tetapi manajer memiliki kepentingannya sendiri.
2. Manajer vs pemegang utang, yaitu manajer mangutak-atik laporan keuangan agar terlihat bagus sehingga diberi pinjaman.
3. Manajer vs pemerintah, yaitu perusahaan yang besar cenderung diawasi oleh pemerintah.
4. Pemegang saham vs pemegang utang, yaitu manajer diasumsikan bertindak atas nama pemegang saham sehingga manajer bertindak sebagai agen dan pemegang utang sebagai prinsipal.
5. Pemegang saham mayoritas vs pemegang saham minoritas, yaitu pemegang saham mayoritas cenderung mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas.

Teori keagenan (*agency theory*) dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1996) dalam Imanta (2011). Teori ini muncul ketika ada hubungan kontrak kerja sama antara manajer dan pemegang saham yang digambarkan sebagai hubungan antara *agent* (manajemen), *principal* (pemegang saham). Hubungan kontrak kerja sama tersebut berupa pemberian wewenang oleh *principal* kepada *agent* untuk bekerja demi pencapaian tujuan *principal*. Manajer diangkat oleh pemilik untuk menjalankan operasional perusahaan karena pemegang saham memiliki keterbatasan dalam mengelola perusahaan.

Pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan inilah yang nantinya memicu adanya konflik kepentingan (*agency conflict*). Menurut Vidyantie dan Handayani (2006) dalam Imanta (2011), teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu dalam perusahaan hanya bertindak atas dasar kepentingan mereka masing-masing. Pemegang saham sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya atas investasi mereka, yang salah satunya tercermin dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Sedangkan *agent* diasumsikan termotivasi untuk meningkatkan insentif atau kompensasi yang diperoleh dari setiap kemampuan yang telah dikeluarkan.

Pemegang saham menilai kinerja berdasarkan kemampuan manajer dalam menghasilkan laba perusahaan. Sebaliknya, manajer berusaha memenuhi tuntutan pemegang saham untuk menghasilkan laba yang maksimal agar mendapatkan kompensasi atau insentif yang diinginkan. Namun, manajer seringkali melakukan manipulasi saat melaporkan kondisi perusahaan kepada pemegang saham agar tujuannya dapat tercapai.

Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan dari pada pemegang saham.

Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Menurut Richardson (1998) dalam Suryani (2010), asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan perataan laba.

Menurut Smith (2011) dalam Fatmawati (2013) ada dua macam konflik kepentingan yaitu:

1. *Moral hazard*

Tindakan agen yang tidak sesuai etika dan mementingkan diri sendiri biasanya tidak diketahui oleh prinsipal. Selain itu, kontrak keagenan didasarkan pada *imperfect*, yaitu *principal* tidak mengetahui seluk-beluk informasi perusahaan yang berkaitan dengan tindakan agen.

2. *Adverse selection*

Agen memiliki informasi yang lebih lengkap ketika kontrak dengan prinsipal belum dibuat (*pre-contracting private information*) dan informasi yang lengkap baru diungkapkan setelah kontrak dijalankan sebelum keputusan dibuat (*superior post contracting but pre-decision private information*). Prinsipal tidak mampu mengontrol apakah agen bertindak untuk kepentingan prinsipal atau kepentingan agen itu sendiri.

Adanya masalah keagenan menyebabkan munculnya *agency cost* atau kos keagenan. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Fatmawati (2013), terdapat 3 macam kos keagenan yaitu:

1. Kos *monitoring* yang dikeluarkan oleh prinsipal, yaitu biaya-biaya untuk memonitor perilaku para agen, contohnya adalah mengaudit laporan keuangan.
2. Kos *bonding* yang dikeluarkan oleh agen, yaitu biaya-biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal, contohnya adalah mempersiapkan laporan keuangan.
3. Kerugian residual, yaitu jumlah kerugian yang dialami oleh prinsipal yang dikarenakan penyimpangan perilaku dan terlalu mahal untuk menghilangkan semua perilaku oportunistik.

Eisenhardt (1989) dalam Suryani (2010), menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
2. manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
3. manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistis* dari manajer, manajer bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

2.2 Perataan Laba

2.2.1 Definisi Perataan Laba Menurut Para Ahli

Menurut Ronen dan Sadan (1976) dalam Zen dan Herman (2004) ”Perataan laba secara operasional didefinisikan sebagai usaha mengurangi atau memperkecil penyimpangan laba selama 20 tahun”.

Menurut Kock (1981) dalam Zen dan Herman (2004) ”Perataan laba adalah suatu upaya manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba antara suatu periode dengan periode sebelumnya yang dianggap normal. Perataan laba mereka lakukan dengan cara merubah metode dan teknik akuntansi (*artificial transaction*), maupun dengan cara memanipulasi transaksi nyata (*real transaction*)”.

Menurut Beidelman (1973) dalam Setiawan (2011) ”Perataan laba adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk memperkecil atau fluktuasi pada tingkat laba yang dianggap normal bagi suatu perusahaan. Dalam pengertian ini perataan mempresentasikan suatu bagian upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi tidak normal dalam laba pada tingkat yang diijinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat”.

Dari ketiga definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perataan laba merupakan usaha yang sengaja dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba antara periode sekarang dengan periode sebelumnya dengan tujuan mengurangi kenaikan atau penurunan laba yang terlalu tajam antar periode.

Perataan laba merupakan fenomena yang sulit dihindari karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Perataan laba timbul sebagai dampak dari penggunaan akuntansi sebagai salah satu alat komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan kelemahan intern yang ada pada akuntansi yang menyebabkan adanya judgement. Pernyataan ini dikemukakan oleh Setiawati (2002) dalam I Guna dan Herawaty (2010).

De Angelo (1986) dalam I Guna dan Herawaty (2010) menyatakan bahwa terdapat konsep model akrual yaitu komponen *discretionary*. Komponen *discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga

laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

Sulistyanto (2008) dalam Pamudji dan Trihartati (2007) menyatakan bahwa, ada beberapa pihak yang dirugikan jika perataan laba di implementasikan diantaranya:

1. Pemegang saham akan kehilangan kesempatan memperoleh *return* dan kehilangan modal yang telah ditanamkannya.
2. Pemerintah akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pajak.
3. Kreditur akan kehilangan *return* dan dana yang dipinjamkan kepada perusahaan yang bersangkutan.

2.2.2 Teknik Perataan Laba

Wolk et. al. (2001:421) dalam Rahmawati (2012) menyatakan bahwa *income smoothing* merupakan suatu cara yang mampu mengurangi resiko yang tidak sistematis dalam portofolio, sehingga dengan demikian perlu diperhatikan tiga cara menyangkut perilaku perataan laba yang dapat diterima antara lain:

1. Manajemen dapat menentukan waktu terjadinya kejadian tertentu melalui kebijakan yang dimiliki. Sebagai alternatif manajer juga dapat menentukan waktu pengakuan kejadian tersebut. Jadi perataan laba dapat dilakukan dengan pengendalian saat terjadinya atau saat pengakuan suatu kejadian.
2. Mengubah metode akuntansi, dalam hal ini manajer dapat mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode akuntansi.
3. Manajer memiliki kebijakan sendiri dalam mengklasifikasikan pos-pos laba rugi tertentu kedalam kategori berbeda. Contohnya pendapatan dan biaya yang tidak berulang-ulang dapat diklasifikasikan sebagai *ordinary/extraordinary item* untuk menimbulkan kesan yang lebih merata pada *ordinary income* yang dilaporkan.

Sugiarto (2003) dalam Amanza (2012) menyatakan bahwa ada beberapa teknik yang digunakan dalam perataan laba diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perataan laba melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi melalui kebijakan manajemen itu sendiri (*accrual*), misalnya: Banyak perusahaan yang menerapkan kebijakan diskon dan kredit sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah piutang dan penjualan pada akhir bulan terakhir tiap kuartal, sehingga laba kelihatan stabil pada periode tertentu.
2. Perataan laba melalui alokasi untuk beberapa periode tertentu. Manajer memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pendapatan dan atau beban untuk periode tertentu. Misalnya, jika penjualan

meningkat maka manajemen dapat membebankan biaya riset dan penelitian serta amortisasi *goodwill* pada periode itu untuk menstabilkan laba.

3. Manajemen memiliki kewenangan dan kebijakan sendiri untuk mengklasifikasikan pos-pos rugi laba dalam katagori yang berbeda. Misalnya, jika pendapatan operasi sulit untuk didefenisikan maka manajer dapat mengklasifikasikan pos itu pada pendapatan operasi atau pendapatan non operasi. Dalam hal ini dapat digunakan sewaktu-waktu untuk meratakan laba melihat kondisi pendapatan periode itu.

Utomo dan Siregar (2008) dalam Kurniasih dan Sudarsi (2012) menyebutkan ada dua tipe aliran perataan laba yaitu:

1. Perataan laba alamiah (*naturally income smoothing*) merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh manajemen secara langsung tanpa adanya rekayasa. Misalnya seseorang mengharapkan laba dari sebuah transaksi penjualan barang dagangan dan biaya operasi. Dalam mencatat transaksi penjualan dan biaya tersebut berlangsung tanpa adanya rekayasa dalam pencatatan. Hal ini merupakan sebuah kejadian yang alami terjadi di perusahaan sehingga aliran laba yang diperoleh juga terjadi secara alami.
2. Perataan laba yang disengaja (*intentionally income smoothing*) terjadi karena adanya campur tangan pihak manajemen. Ada 2 jenis perataan laba yang disengaja yaitu:
 - a. Perataan laba riil

Perataan laba riil merupakan tindakan manajemen dalam mengendalikan peristiwa ekonomi yang secara langsung mempengaruhi laba perusahaan di masa yang akan datang. Horwitz (1997) menyatakan bahwa perataan laba riil mempengaruhi aliran kas. Misalnya waktu terjadinya transaksi aktual dapat ditentukan oleh manajemen sehingga pengaruh transaksi tersebut laba yang dilaporkan cenderung rata sepanjang tahun.
 - b. Perataan laba artifisial

Perataan laba artifisial merupakan usaha yang dilakukan manajemen untuk meratakan laba dengan cara manipulasi. Misalnya manajer melakukan manipulasi dengan cara menggeser biaya atau pendapatan dari satu periode ke periode lainnya. Selain itu akuntan juga dapat mengubah metode depresiasi dari metode garis lurus menjadi metode saldo menurun ganda.

2.2.3 Alasan Manajer Melakukan Perataan Laba

Menurut Anggraini (2005) dalam Budiasih (2006) ada beberapa alasan manajemen melakukan perataan laba yaitu:

1. Dapat melakukan rekayasa mengurangi laba dan menaikkan biaya pada periode berjalan sehingga dapat mengurangi hutang pajak.
2. Dapat meningkatkan kepercayaan investor karena dapat mendukung kestabilan penghasilan dan kebijakan dividen sesuai dengan keinginan
3. Dapat mempererat hubungan antara manajer dan karyawan
4. Dapat memberikan dampak psikologis terhadap perekonomian, karena hal tersebut dapat menurunkan harapan yang terlalu optimistik dan menaikkan harapan yang terlalu pesimistik

Menurut Scott (2000) dalam Pualam (2009) terdapat beberapa faktor yang mendorong manajemen melakukan perataan laba diantaranya:

1. *Kompensasi Bonus (Bonus Plan)*
Laba sering dijadikan indikator penilaian prestasi manajer perusahaan, motivasi bonus merupakan dorongan bagi manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk mendapatkan bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut, jika laba lebih rendah dari pada laba yang ditetapkan maka akan mendorong manajer untuk melakukan perataan laba, dengan cara meningkatkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu.
2. *Kontrak utang (Orther Contractual Motivation)*
Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan perjanjian utang yang berisikan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan investor, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, pemberian modal kerja atau laporan ekuitas jatuh dibawah tingkat yang ditetapkan dan semua aktivitas yang dapat mencairkan sekuritas pemberi pinjaman. Karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya tinggi, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindarinya dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. *Faktor politik (Political Motivations)*
Motivasi ini terjadi pada perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis yang cenderung menurunkan laba visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini diperoleh untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, misalnya subsidi, perlindungan dari pesaing luar negeri untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh.
4. *Pengurangan pajak (Taxation Motivation)*
Dalam hal ini manajer berusaha menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Karena laba berbanding lurus dengan beban pajak, apabila laba semakin besar maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan semakin tinggi. Untuk menghindari hal tersebut maka perusahaan akan melakukan perataan laba agar laba yang dilaporkan kepada fiscal

lebih rendah sehingga akan mengurangi beban pajak yang akan ditanggungnya.

5. Perubahan CEO (*Change of Chief Executive Officer*)
Motivasi ini terjadi ketika dalam kasus pergantian manajer biasanya diakhiri tahun tugasnya, manajer akan melaporkan laba yang tinggi, sehingga CEO yang baru merasa sangat berat untuk mencapai tingkat laba tersebut atau ketika pimpinan perusahaan yang mempunyai kinerja buruk sehingga mereka akan melakukan perataan laba untuk menunda pemecatan agar pimpinan tersebut mempunyai cukup waktu untuk memperbaiki kinerjanya.
6. Penawaran saham perdana (*Initial Public Offerings*)
Perusahaan yang baru saja menerbitkan saham perdana (IPO) belum bisa memiliki harga saham yang mapan. Cara untuk mempengaruhi pasar adalah dengan memberikan informasi *net income* sehingga pasar memberikan respon positif terhadap harga saham.

2.2.4 Sasaran Perataan Laba

Foster (1986) dalam Setiawan (2011) mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai sasaran dalam praktik perataan laba yaitu:

1. Unsur penjualan, meliputi:
 - a. Pembuatan faktur, contohnya dengan membuat faktur dan mengakuinya sebagai penjualan periode sekarang meskipun sebenarnya merupakan penjualan pada masa mendatang.
 - b. Pembuatan pesanan atau penjualan fiktif.
 - c. *Downgrading* (penurunan) produk, contohnya dengan mengklasifikasikan produk yang belum rusak kedalam kelompok produk rusak dan dilaporkan dengan harga yang lebih rendah dari yang sebenarnya.
2. Unsur biaya, meliputi:
 - a. Memecah-mecah faktur, contohnya: suatu faktur pembelian dijadikan beberapa faktur dengan tanggal yang berbeda dan dilaporkan dalam beberapa periode akuntansi.
 - b. Mencatat *prepayment* (biaya dibayar dimuka sebagai biaya), contohnya: mengakui suatu biaya di bayar dimuka untuk tahun depan sebagai biaya dalam tahun yang bersangkutan.

2.2.5 Tujuan Perataan Laba

Beidleman (1973) dalam Rahmawati (2012) mengemukakan bahwa tujuan perataan laba yaitu untuk mengurangi fluktuasi pada pelaporan laba dan mengurangi resiko sehingga harga sekuritas yang tinggi menarik perhatian pasar.

Sedangkan menurut Foster (1986) dalam Rahmawati (2012) menyatakan bahwa tujuan perataan laba antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang rendah
2. Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba di masa yang akan datang
3. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis
4. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen
5. Meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen.

2.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan menggunakan proksi yang dapat mewakili ukuran perusahaan yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan proksi total aset untuk mewakili ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara misalnya kapitalisasi pasar yang dimiliki perusahaan, total aset yang dimiliki atau dengan total penjualan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan didasarkan pada *logaritma natural* dari total aset pernyataan ini dikemukakan oleh Tuti dan Indrawati (2007;158) dalam Ernawati (2010). *Logaritma natural* digunakan untuk memperluas data total aset dan diharapkan mampu mengeliminir perbedaan total aktiva yang terlalu besar antara perusahaan satu dengan yang lainnya.

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Pernyataan ini dikemukakan oleh Nuryaman (2007) dalam Sulyanti (2011).

Menurut Suwito dan Herawaty (2005) dalam Budiasih (2006) menemukan bukti bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan yang lebih besar menjadi subjek pemeriksaan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum.

Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang, sedangkan bagi pemerintah akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektivitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut Kurniasih dan Sudarsih (2012), secara sistematis ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Aset}$$

2.4 Konsentrasi Kepemilikan

Rata-rata perusahaan-perusahaan di Indonesia masih belum terdapat pemisahan antara kepemilikan dan kendali. Rata-rata perusahaan di Indonesia masih didominasi oleh keluarga yang juga merupakan bagian dari manajemen. Variabel konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh individu.

Konsentrasi kepemilikan menggambarkan bagaimana dan siapa yang memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas kepemilikan perusahaan serta keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali atas aktivitas bisnis pada suatu perusahaan. Apabila terdapat perusahaan yang menggunakan saham ataupun obligasi dalam mendanai aktivitas bisnisnya, kemungkinan besar perusahaan tersebut memiliki sekelompok pemegang kendali atas aktivitas bisnis perusahaan. Pada umumnya kelompok pengendali aktivitas bisnis perusahaan tersebut juga memiliki hak atas kepemilikan perusahaan atas dana yang mereka investasikan, sehingga kepemilikan perusahaan secara otomatis juga akan terkonsentrasi kepada kelompok yang dimaksud.

Menurut Dallas (2004) dalam Sulyanti (2011), kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar, jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya.

Menurut Nuryawan (2009), secara sistematis konsentrasi kepemilikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Konsentrasi Kepemilikan} = \text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar yang dimiliki PT}$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Rumus Variabel	Hasil
1.	Linda Kurniasih Butar-Butar dan Sri Sudarsi (2012)	Dependen: Perataan Laba Independen: Ukuran Perusahaan	Ln Total Aktiva	Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap perataan laba
2.	Igan Budiasih (2006)	Dependen: Perataan Laba Independen: Ukuran perusahaan	Ln Total Aktiva	Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik perataan laba
3.	Ni Luh Putu Arik Prabayanti dan Gerianta Wirawan yasa (2008)	Dependen: Perataan Laba Independen: Ukuran perusahaan	Ln Total Aktiva	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba
4.	Wisnu Arwindo Irawan (2013)	Dependen: Perataan Laba Independen: Ukuran Perusahaan	Ln Market Capitalization	Ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap perataan laba
5	I Gusti Ayu Putu Shinta Pangestti (2008)	Dependen: Perataan Laba Independen: Ukuran Perusahaan	Ln Market Capitalization	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba
6	Abdullah Taman dan Bily Agung Nugroho (2011)	Dependen: Perataan Laba Independen: Konsentrasi Kepemilikan	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Total Saham Perusahaan}} \times 100\%$	Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap perataan laba

7	Nuryaman (2009)	Dependen: Perataan Laba Independen: Ukuran Perusahaan dan Konsentrasi Kepemilikan	Ln Penjualan Jumlah Kepemilikan terbesar	Ukuran perusahaan dan Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap perataan laba
---	-----------------	---	---	--

2.6 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap perataan laba
H₂ : Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap perataan laba
H₃ : Ukuran Perusahaan dan Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap perataan laba